

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Pertimbangkan Putihkan Tunggakan Sewa Rusunawa

Bola di tangan Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk memutuskan penghapusan tunggakan yang totalnya sekitar Rp 50 miliar.

Avit Hidayat

avit.hidayat@tempo.co.id

JAKARTA — Pemerintah DKI Jakarta mempertimbangkan untuk menghapus tunggakan sewa bulanan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang totalnya sekitar Rp 50 miliar pada tahun ini. Pemerintah daerah belum menemukan jalan keluar untuk membuat bekas warga gusuran dari bantaran kali tersebut tertib membayar sewa bulanan sebesar Rp 150-300 ribu itu.

Kepala Bidang Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budias-tuti, mengatakan sudah mengusulkan penghapusan denda dan tunggakan atau pemutihan sejak tahun lalu. Usul itulah, antara lain, yang mendasari Gubernur Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.

"Tapi itu belum kami sosialisasikan ke warga," kata Meli kepada *Tempo*, dua hari lalu.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah tunggakan sewa rusunawa sudah mencapai Rp 50 miliar. Jumlah tunggakan terus meningkat seiring dengan gencarnya pemerintah DKI melakukan peng-gusuran pada 2017. Pada saat itu jumlah tunggakan menjadi Rp 31,7 miliar.

Tunggakan sempat turun drastis, lalu merangkak naik belakangan ini.

Menurut Meli, proses pemutihan tersebut harus dibicarakan dan disetujui oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta selaku lembaga yang memiliki otoritas terhadap retribusi daerah. BPKD juga wajib mensosialisasikan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.

Kepala Bidang Penertiban Rumah Susun Marunda, Murni Sianturi, menjelaskan tunggakan sewa dan denda rusunawa pada tahun lalu saja sekitar Rp 9 miliar. "Sekarang masih banyak, bahkan lebih dari itu," ucap dia kepada *Tempo*.

Adapun Kepala BPKD DKI Jakarta, Edi Sumantri, belum menjelaskan soal rencana pemutihan tunggakan sewa rusunawa. Dia tidak bisa ditemui saat *Tempo* menyambangi kantornya. Edi juga tak menjawab panggilan telepon dari *Tempo*.

Meli menuturkan, Pergub tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah mengatur beberapa syarat sebelum penunggak sewa dibebaskan dari tagihan dan denda. Salah satunya, piutang macet dapat dihapuskan oleh pemerintah DKI apabila umur piutang retribusi daerah lebih dari 12 bulan. Kriteria berikutnya adalah wajib retribusi meninggal, tidak memiliki harta kekayaan lagi yang

dinyatakan dengan keterangan miskin, serta dinyatakan pailit.

Menurut Meli, penghuni rusunawa menunggak sewa karena beberapa alasan, di antaranya lantaran miskin. "Mereka juga menanggung biaya kehidupan anak dan biaya sekolah. Itu klasik, ya." Karena itu, pemerintah DKI sedang menginventarisasi warga yang layak dibebaskan dari tagihan dan yang tidak.

Pemerintah DKI telah mengeluarkan anggaran ratusan miliar rupiah setiap tahun untuk biaya operasional rusunawa. Jumlahnya hingga 80 persen dari retribusi yang didapat dari tagihan sewa. Apalagi, warga rusunawa sudah mendapatkan subsidi sewa sehingga tiap bulan hanya ditagih Rp 150-300 ribu.

Pemerintah DKI memiliki lebih dari 17 ribu unit rusunawa yang tersebar di 24 lokasi di seluruh kawasan Ibu Kota. Tahun ini jumlahnya akan bertambah 9.000 unit atau 13 tower di sembilan lokasi. Menurut rencana, tower rusunawa yang baru bakal dihuni masyarakat yang sebelumnya telah mendaftar.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, sepakat terhadap usul pemerintah DKI untuk menghapus atau melakukan pemutihan denda dan tunggakan bagi warga rusunawa. Dia menilai toh selama ini tunggakan dan denda sewa tersebut tak pernah

terbayar.

Setelah dilakukan pemutihan dan warga rusunawa tak terbebani lagi dengan uang sewa, Gembong meminta pemerintah DKI mampu membuat mereka disiplin membayar sewa atau tunggakan. Tanpa program yang jelas dan tegas, dia khawatir warga rusunawa kembali menunggak sewa setelah pemutihan pada tahun ini.

"Yang terpenting, setelah diputihkan, ke depannya (warga) mesti disiplin," tutur Gembong. ●

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Pertimbangkan Putihkan Tunggakan Sewa Rusunawa

Tunggakan Rusun Tak Kunjung Rampung

TUNGGAKAN sewa unit rumah susun milik pemerintah DKI menjadi persoalan sejak 2014. Sebagian besar penghuninya menunggak sewa bulanan yang mencapai Rp 50 miliar hingga tahun ini. Para penghuni rumah susun sewa (rusunawa) merupakan warga gusuran. Pemerintah DKI belum menemukan formula yang tepat untuk membuat mereka membayar sewa Rp 150-300 ribu per bulan. Pendapatan yang rendah diduga menjadi alasan utama tunggakan sewa.

BERIKUT INI DATA RUSUNAWA MILIK PEMERINTAH DKI JAKARTA:

BIAYA PEMELIHARAAN RUSUNAWA DAN FASILITASNYA PADA 2019:

- » Pemeliharaan kawasan Rumah Susun Flamboyan: **Rp 7,4 miliar.**
- » Pemeliharaan kawasan Rumah Susun Komarudin: **Rp 11,4 miliar.**
- » Pemeliharaan masjid di Rusun Kapuk Muara: **Rp 1,9 miliar.**
- » Pemeliharaan masjid di Rusun Marunda: **Rp 5,9 miliar.**
- » Pemeliharaan masjid di Rusun Tipar Cakung: **Rp 2,4 miliar.**
- » Pemeliharaan berkala Rumah Susun Pinus Elok: **Rp 1,9 miliar.**
- » Pemeliharaan masjid di Rusun Tambora: **Rp 2,4 miliar.**
- » Pemeliharaan masjid di Rusun Pondok Bambu: **Rp 749 juta.**
- » Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Rawa Bebek: **Rp 18,7 miliar.**
- » Pemeliharaan berkala Rumah Susun Semper: **Rp 1,5 miliar.**
- » Pemeliharaan berkala Rumah Susun Tambora: **Rp 13 miliar.**
- » Pemeliharaan berkala Rumah Susun Marunda: **Rp 25,8 miliar.**
- » Pemeliharaan berkala Rumah Susun Daan Mogot: **Rp 7,9 miliar.**
- » Pemeliharaan berkala Rumah Susun Rawa Buaya: **Rp 1,9 miliar.**
- » Pemeliharaan berkala Rumah Susun Komarudin: **Rp 6,3 miliar.**

TEKS: AVIT HIDAYAT | SUMBER: WAWANCARA, APBD DKI JAKARTA

JUMLAH RUSUNAWA DI JAKARTA
17 ribu unit

JUMLAH LOKASI
24
YANG TERSEBAR DI LIMA WILAYAH



TARIF SEWA
Rp 150-300 ribu
PER BULAN

TOTAL TUNGGAKAN PADA 2019
SEKITAR
Rp 50 miliar

TOTAL BIAYA OPERASIONAL RUSUNAWA PADA 2019 SEKITAR
Rp 109,14 miliar